

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Lembaga pendidikan Islam di Jambi terbentuk karena adanya kesadaran penuh oleh ulama-ulama terdahulu yang peduli akan pendidikan bagi masyarakat khususnya masyarakat Jambi Kota Seberang, salah satu hal yang berpengaruh tentang keberlangsungannya pendirian lembaga pendidikan Islam yaitu Organisasi Tsamaratul Insan, pembelajaran agama Islam awalnya hanya berlangsung di Surau kemudian beralih menjadi madrasah dan kemudian pondok pesantren. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan non-formal hal ini dikarenakan pondok pesantren tidak memiliki izin, tidak adanya sistem resmi seperti adanya data-data pondok pesantren atau aturan resmi bagi tenaga pendidik maupun bagi lembaga pendidikan Islam itu sendiri yang berada di Jambi Kota Seberang.

Ketenangan yang dirasakan oleh lembaga pendidikan Islam itu tidak bertahan lama dikarenakan masuknya Belanda ke Jambi membuat lembaga pendidikan Islam yang sebelumnya bebas beroperasi sempat beku dikarenakan Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat pondok pesantren sempat kesulitan beroperasi. Terutama pondok pesantren sa'adatudaren yang berada di daerah Kota Jambi Seberang mengalami kesulitan karena pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan Ordanasi Guru dan Widdle School Ordantie yang dimana peraturan tersebut sangat berat bagi lembaga pendidikan Islam. Untungnya pondok pesantren ini berada dibawah naungan perukunan Tsamaratul Insan yang dimana

pondok pesantren sa'adatudaren ini boleh beroperasi namun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Kebijakan ordanansi guru dan *widle school Ordanantie* di Jambi pada tahun 1915-1942 menunjukkan upaya pemerintah kolonial Belanda dalam mengatur dan mengendalikan pendidikan di wilayah tersebut. Ordanansi ini bertujuan untuk memperkuat kontrol kolonial atas sistem pendidikan dan untuk mengarahkan pendidikan sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi Belanda. Hal ini tercermin dalam upaya standarisasi kurikulum, pengawasan terhadap pengajaran, dan penempatan guru-guru yang sesuai dengan kebijakan kolonial. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kendali pemerintah atas pendidikan, kebijakan ini juga menjadi pusat perdebatan dan perlawanan dari masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan dan kurang terwakili dalam sistem pendidikan yang didominasi oleh kepentingan asing.

Atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda membuat pondok pesantren kini menjadi lebih teratur dengan kata lain pondok pesantren ini dapat menyatarakan dengan sekolah Belanda yang di mana sekolah Belanda mempunyai sistem kurikulum dan dokumen-dokumen yang lengkap. Pondok pesantren Sa'adatudaren sampai saat ini masih beroperasi dengan menggunakan sistem yang sama dengan yang terdahulu yaitu sistem salafiyah. Adapun Pondok Pesantren Sa'adatudaren ini berguna untuk masyarakat seberang menimba ilmu tentang pendidikan agama Islam.